

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

1.1.1 Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : Paguyuban Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM)
Alamat Perusahaan : Rumah Kreatif BUMN Telkom, Jalan Raya Soreang No. 17,
Kel. Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Indonesia
Bidang Usaha : Komunitas UMKM
No. Telp : 022-5891205/+62-8112243738
Email : suryaukuei@gmail.com
Jam Kerja : Senin – Jum’at, 08-00 – 16-00

1.1.2 Sejarah Singkat PPKM

Paguyuban Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) merupakan sebuah komunitas dan lembaga pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang didirikan pada bulan Januari 2017 oleh Bapak. H. Surya Budiawan yang juga merupakan pelaku UMKM melalui perusahaan garmen miliknya, UKUEI Garmen Manufacturing. Dalam perjalanannya PPKM telah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas UMKM binaannya melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi UMKM, seperti manajemen, marketing, pengelolaan keuangan, dan aspek-aspek lainnya. Hingga saat ini UMKM anggota binaan Paguyuban Pengusaha Kecil Menengah (PPKM) terdata sebanyak 105 UMKM dan tersebar di 31 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandung.

Pada bulan Agustus lalu PPKM bekerja sama dengan Universitas Parahyangan bersama Dinas Koperasi untuk menyelenggarakan program pelatihan SCORE, yaitu sebuah program pelatihan yang mengajarkan tentang prosedur-prosedur baru terkait cara untuk meningkatkan kerjasama di tempat kerja, produktivitas, dan mutu produk UMKM. Selanjutnya pada bulan September, PPKM melaksanakan penandatanganan kerja sama Universitas dengan Bina Nusantara (Binus) untuk melakukan pelatihan yang berkesinambungan. Pada bulan Oktober lalu PPKM berhasil mengukuhkan kerja sama dengan PT. Telkom Indonesia untuk melakukan kerja sama melalui penggunaan fasilitas Rumah Kreatif BUMN (RKB) PT. Telkom yang berlokasi di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dan juga mendapatkan pelatihan digitalisasi UMKM

yang merupakan strategi jaringan RKB nasional dalam upaya peningkatan kompetensi dan daya saing UMKM di Indonesia.

1.1.3 Logo PPKM



Gambar 1.1 Logo PPKM

Sumber : Arsip Perusahaan

1.1.4 Kegiatan PPKM

Paguyuban Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) bersama dengan Rumah Kreatif BUMN (RKB) akan mendampingi dan mendorong para pelaku UKM dalam menjawab tantangan utama pengembangan usaha UKM dalam hal Peningkatan kompetensi, Peningkatan Akses Pemasaran dan Kemudahan akses Permodalan. Pendampingan dilakukan melalui proses kegiatan yang diawali dengan proses registrasi dan analisa data UMKM.

Hasil seleksi UKM dengan klasifikasi kompetensi medium sampai dengan high akan diarahkan langsung pada tempat konsultasi dan quality control. Di tempat ini, pelaku UKM akan didampingi para ahli dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kualitas produk, standarisasi bahan baku, standarisasi produksi, bimbingan pengembangan produk baru, packaging, branding, quality control dan bimbingan pendanaan. Sedangkan UKM dengan kompetensi low sampai dengan medium akan diarahkan menuju tempat belajar dan berbagi. Di tempat ini, pelaku UKM mendapatkan pelatihan sesuai dengan modul yang dibutuhkan, antara lain Bisnis dan Keuangan, Permodalan, Segmentasi dan Target Pasar, Proses Produksi dan Pemasaran serta Total Quality Management.

Setelah selesai mengikuti pelatihan, pelaku UKM akan diajak melakukan sharing session (diskusi). Selanjutnya Pendamping Ahli dari tim RKB akan membantu

pelaku UKM untuk melakukan digitalisasi produk dan proses usaha di tempat digitalisasi dan e-commerce online dengan membimbing bagaimana cara merambah pasar online, SEO (Search Engine Optimization), dan promosi melalui social media. Pelaku UKM akan melakukan praktek secara langsung pembuatan dan pengelolaan online commerce, serta berdiskusi dan memonitor perkembangannya.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan paradigma pembangunan manusia Indonesia sebagai individu yang utuh dan pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan merata yang berlandaskan pada nilai-nilai kepribadian bangsa yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar, pedoman, dan tujuan pembangunan. Pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan politik terpusat yang tidak merata telah menciptakan sebuah fondasi dan kinerja perekonomian yang rapuh serta berdampak negatif terhadap daya saing ekonomi (Beazer, 2014).

Oleh karena itu, pemerintah mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai prioritas dalam upaya pembangunan nasional, dengan menciptakan perekonomian kerakyatan yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan pekerjaan yang memadai, dan peningkatan pendapatan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Sasaran pembangunan tersebut hanya dapat dicapai apabila Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dijadikan sebagai roda penggerak inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, UMKM telah menjadi salah satu agenda utama pembangunan ekonomi di Indonesia (Kementrian Keuangan RI, 2015).

Pada dasarnya, UMKM adalah kelompok usaha yang bergerak dengan memanfaatkan sumber daya alam serta padat karya seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan, sehingga sering disebut sebagai moda penggerak ekonomi berbasis kerakyatan dimana produk-produk yang dihasilkan merupakan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat luas dari setiap lapisan. Krisis ekonomi Asia yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 menstimulasi pertumbuhan UMKM di Indonesia karena berdampak pada banyaknya pekerja formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat banyaknya perusahaan-perusahaan besar di sektor formal yang mengalami kerugian. Kondisi ini mendorong mereka yang menganggur

untuk bekerja maupun mendirikan usaha mereka sendiri pada sektor informal (Setiawan, 2011).

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1.1 diambil dari laporan Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2013, jumlah unit usaha UMKM secara nasional mencapai 57.895.721 unit dan mampu memberikan kontribusi sebesar 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, berdasarkan data yang sama, UMKM juga berhasil menyerap tenaga kerja hingga 114.144.082 jiwa atau 96,99% dari jumlah tenaga kerja Indonesia. Pertumbuhan UMKM di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2013 mengalami peningkatan sebesar 2% setiap tahunnya dan mencetak pertumbuhan nilai ekspor non-migas rata-rata sebesar 5% dari tahun ke tahun yang dapat menjadi alternatif pendapatan devisa negara di tengah rendahnya harga komoditas dunia yang turut memukul ekonomi negara-negara berkembang beberapa tahun kebelakang (IMF World Economic Outlook Update, 2016).

Tabel 1.1 Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2013

No.	Indikator	Satuan	Jumlah	Pangsa (%)	Pertumbuhan Tahun 2012-2013 (%)
1.	Unit Usaha	(Unit)	57.895.721	99,99	2,41
2.	Tenaga Kerja	(Orang)	114.144.082	96,99	6,03
3.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku	(Rp. Milyar)	5.440.007,9	60,34	11,71
4.	Total Ekspor Non-Migas	(Rp. Milyar)	182.112,7	15,68	9,29

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM 2013

Penggolongan jenis UMKM di Indonesia merujuk pada konsep *International Standard Classification of All Economic Activities* (ISIC) dengan tujuan untuk mempermudah klasifikasi dan perbandingan komparatif aktivitas ekonomi dengan berbagai macam kegiatan. Apabila ditinjau berdasarkan proporsi jenis usaha UMKM melalui Laporan Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2011 yang dikutip dalam Laporan Profil Bisnis UMKM yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia (BI) pada tahun 2015, maka urutan sektor-sektor usaha yang memiliki proporsi unit usaha terbesar hingga terkecil adalah: 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (48,85%); 2. Perdagangan, Hotel dan Restoran (28,83%); 3. Pengangkutan dan Komunikasi (6,88%); 4. Industri Pengolahan (6,41%); 5. Jasa-jasa (4,52%); 6. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (2,37%); 7. Bangunan (1,57%); 8. Pertambangan dan Penggalian (0,53%); 9. Listrik, Gas dan Air Bersih (0,03%), seperti data yang tertera pada grafik 1.1.



Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Sektor 2011

Sumber: Laporan Profil Bisnis UMKM LPPI dan BI 2015

Begitupun dengan pembangunan ekonomi di Jawa Barat, dimana UMKM memiliki pengaruh yang relatif besar terhadap keberlangsungan perekonomian daerah. Dominasi pelaku UMKM di Jawa Barat ditandai dengan jumlah unit usaha yang mencapai 9,1 juta unit atau sekitar 6,17% dari jumlah total unit UMKM di Indonesia. Dari jumlah itu, UMKM melakukan penyerapan tenaga kerja sebesar 15.007.695 jiwa dan berkontribusi terhadap PDRB Jawa Barat hingga 55,54% (Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat, 2014). Karakteristik UMKM yang mudah untuk dibentuk serta mudah dibubarkan menyebabkan jumlah unit UMKM sangat dinamis. Menurut Dinas KUMKM (2013), jumlah unit UMKM di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dari tahun 2011 ke tahun 2012. Perkembangan UMKM di Jawa Barat dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah UMKM dan UB Provinsi Jawa Barat

UNIT USAHA	2011		2012		Pertumbuhan	
	Jumlah (unit)	Pangsa (%)	Jumlah (unit)	Pangsa (%)	Jumlah (unit)	(%)
A. UMKM	8.750.914	99,98	9.166.503	99,97	415.589	4,75
Usaha Mikro	8.626.671	98,56	9.042.519	98,62	415.848	4,82
Usaha Kecil	116.062	1,32	115.749	1,26	-313	-0,27
Usaha Menengah	8.181	0,09	8.235	0,08	54	0,66
B. Usaha Besar (UB)	1.728	0,01	1.853	0,02	125	7,23
Total (UMKM + UB)	8.752.642	100	9.168.356	100	415.714	4,74

Sumber: Dinas KUMKM Jawa Barat (2013)

Dibalik itu, Kota Bandung berperan penting dalam kinerja perekonomian Jawa Barat. Dari tahun 2007 hingga 2011 Kota Bandung rata-rata berkontribusi 11,6% dalam pergerakan ekonomi Jawa Barat. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bandung sendiri mulai berkembang pesat sejak tahun 2000, hal ini menstimulus perkembangan perekonomian Kota Bandung dengan terus menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya sehingga. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Apabila dilakukan perbandingan, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada periode 2008 hingga 2012 mencapai 8,53%, lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan Jawa Barat yang sebesar 5,86%, maupun Nasional dengan angka 5,8% (Peraturan Daerah Kota Bandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 2014).

Tabel 1.3 Pertumbuhan Jumlah UMKM Kota Bandung

NO	URAIAN	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	MIKRO	3.649	3.827	3.921	4.115	4.301	4527
2	KECIL	301	325	337	357	372	390
3	MENENGAH	271	273	273	274	276	281
	JUMLAH	4.221	4.425	4.531	4.746	4.948	5198

Sumber: Dinas KUMKM dan Perindag Kota Bandung Tahun 2015

Data-data di atas sejalan dengan peran utama UMKM menurut Urata dalam Sulistyastuti (2004) sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi Indonesia, sebagai penyedia peluang kerja, sebagai pengembang ekonomi lokal dan masyarakat, sebagai lokomotif pencipta pasar dan inovasi dengan memanfaatkan fleksibilitas dan sensitivitas, serta memberikan sumbangsih terhadap peningkatan ekspor non-migas negara, dan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Menurut Wahyuni, et al. (2005) UMKM merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena beberapa hal, antara lain:

1. Sektor UMKM dapat bertahan di tengah guncangan krisis ekonomi global.
2. Perhatian dan bantuan pemerintah terhadap UMKM masih kurang.
3. Sektor UMKM adalah kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.
4. Sektor UMKM berperan penting dalam struktur perekonomian nasional.

Namun seiring pertumbuhannya di Indonesia, UMKM seringkali menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi penghambat perkembangan serta mengancam keberlangsungan usahanya, antara lain adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kurangnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi, kurangnya informasi dan akses terhadap permodalan, pemasaran dan peningkatan kapabilitas. Menurut Rahaman (2011) akses terhadap permodalan adalah faktor terpenting dalam operasional aktivitas bisnis, karena tanpa kemudahan akses permodalan, akan berdampak terhadap kerentanan keberlangsungan dan penumbuhan potensi usaha.

Rahaman juga menilai bahwa UMKM tidak pernah mudah dalam upaya memperoleh bantuan modal dan jasa perbankan lainnya dengan tingkat pengembalian serta persyaratan yang terjangkau. Hal senada juga disampaikan oleh Beck, et al. (2015) dimana aksesibilitas keuangan baik dari sumber-sumber formal maupun

informal dapat mengurangi permasalahan hambatan kredit yang akan digunakan oleh pelaku usaha sebagai investasi awal maupun pengembangan usaha.

Guna meningkatkan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM, pemerintah melakukan perluasan fasilitas pembiayaan usaha berskala kecil hingga menengah di Indonesia melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program permodalan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal usaha dan investasi dengan didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Meskipun KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah, namun sumber pemberian dana KUR berasal sepenuhnya dari dana perbankan. Berdasarkan penelitian Noordiansyah (2016), dari target penyaluran dana KUR senilai Rp 120 triliun di tahun 2016, hanya sebesar Rp 39,2 triliun yang berhasil terealisasi hingga bulan Mei 2016.

Salah satu penyebab rendahnya pencapaian penyaluran kredit oleh pihak kreditur formal, khususnya perbankan, dikarenakan lembaga penyalur kredit kerap berhati-hati dalam memberikan akses kredit kepada para pelaku UMKM karena pihak penyalur kredit tidak dapat menilai kondisi dan kinerja UMKM yang sebenarnya dapat dituangkan dalam bentuk laporan keuangan UMKM (Rudiantoro & Siregar, 2012), namun mayoritas pelaku UMKM kurang mampu memberikan laporan akuntansi keuangan untuk dapat menjelaskan kondisi usahanya (Baas & Schrooten, 2006).

Selain realisasi penyaluran pembiayaan yang masih di bawah target, jangkauan dari program pemerintah dalam rangka memudahkan akses modal bagi para pelaku UMKM juga belum merata. Berdasarkan data LPPI dan BI dalam Laporan Profil Bisnis UMKM pada tahun 2015, sekitar 60-70% UMKM belum mendapatkan akses pembiayaan dari sektor perbankan. Diantara penyebabnya adalah permasalahan geografis. Belum banyak perbankan yang mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok di Indonesia. Selain itu persyaratan pembiayaan yang meliputi persyaratan administratif, jangka waktu pengembalian, dan jaminan juga diidentifikasi sebagai penyebab tidak menyuluruhnya penyaluran akses pembiayaan oleh sektor perbankan. Sejalan dengan temuan LPPI dan BI, hasil penelitian Stiglitz dan Weiss (1981) menyebutkan bahwa keraguan usaha kecil dalam mengakses kredit timbul karena mereka tidak memahami mengapa sebuah jaminan harus menjadi syarat sebuah pinjaman pembiayaan.

Selain sektor pembiayaan formal dan program pembangunan pemerintah, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga hadir memberikan alternatif akses pembiayaan mikro dan mengalami perkembangan yang sangat pesat dua dasawarsa terakhir sejak kesuksesan program Grameen Bank di Bangladesh pada awal tahun 1980 yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus, peraih nobel perdamaian tahun 2006. Mengacu pada Undang Undang No.1 tahun 2013, LKM merupakan sebuah institusi yang berorientasikan pada motif profit dan motif sosial dengan kegiatan yang lebih bersifat *community development* atau pembembangan komunitas tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan (Baskara, 2013). Baskara (2013) juga mengemukakan bahwa dalam pemberian akses pembiayaan, LKM juga menerapkan persyaratan administratif meskipun cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan persyaratan yang diberikan oleh sektor formal seperti perbankan.

Adanya persyaratan administratif dalam akses pembiayaan berupa pembuatan laporan keuangan UMKM merupakan hal yang sulit dipenuhi oleh para pelaku UMKM (Rudiantoro & Siregar, 2012). Lusimbo dan Muturi (2015) menjelaskan hal ini terjadi dikarenakan masih minimnya literasi keuangan pelaku UMKM yang meliputi kemampuan dan pengetahuan UMKM dalam melakukan pengelolaan dan pencatatan keuangan sehingga dapat memperkecil kesempatan UMKM dalam mendapatkan pembiayaan pada lembaga-lembaga penyedia kredit. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Nkundabanyanga, et al. (2014) yang mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi akses kredit UMKM pada lembaga penyedia modal adalah literasi keuangan pemilik UMKM.

Berdasarkan rumusan *The Association of Chartered Certified Accountants* (2014) literasi keuangan mencakup pengetahuan mengenai konsep keuangan, pemahaman komunikasi mengenai konsep keuangan, kemampuan mengelola keuangan pribadi ataupun perusahaan serta kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan pada situasi-situasi tertentu. Melalui literasi keuangan yang baik, pelaku UMKM dapat memanfaatkan pengetahuannya tersebut dalam proses pengambilan keputusan yang tepat bagi usaha yang sedang mereka kelola untuk mencapai tujuan dan mempertahankan keberlangsungan hidup usaha (Muraga dan John, 2015; Draxler, Fischer, dan Schoar, 2014).

Di Indonesia, tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Persentase masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan, kemampuan, serta keyakinan pengelolaan keuangan dengan baik (*well literate*) hanya sebesar 21.8% saja berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013. Sebagai pembandingan, Indonesia tertinggal jauh dari Malaysia yang memiliki tingkat literasi keuangan *well literate* sebesar 66%, Singapura sebesar 98%, dan Thailand dengan 73% (Bank Negara Indonesia, 2014). Data OJK pada tahun 2016 menunjukkan sedikit peningkatan pada tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang beranjak naik ke angka 29,6%. Hasil survei OJK yang melakukan stratifikasi tingkat literasi keuangan berdasarkan wilayah provinsi pada Gambar 1.1 menunjukkan Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat literasi keuangan tertinggi sebesar 40%, diikuti oleh Jawa Barat dengan nilai 38,7%, dan Papua Barat menjadi provinsi dengan tingkat literasi keuangan paling rendah dengan nilai 19.27%.



Gambar 1.3 Hasil Survei Tingkat Literasi Provinsi Pada Tahun 2016, OJK

Sumber: Survei Nasional Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan 2016, OJK

Selain itu, mengacu pada data OJK pada tahun 2014, tingkat literasi di kalangan para pelaku UMKM hanya sebesar 15,68%. Rendahnya tingkat literasi keuangan para pelaku usaha dapat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain manajemen hutang, pengelolaan tabungan dan kredit, dan perencanaan masa depan. Literasi keuangan yang lebih tinggi secara signifikan berdampak positif dengan

penggunaan jasa keuangan yang lebih besar (Cole, et al., 2009). Akudugu, et al. (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa individu yang memiliki pengetahuan keuangan yang baik dan beragam dapat meningkatkan peluang keberhasilan untuk memperoleh akses pembiayaan.

Penelitian terdahulu yang meninjau hubungan antara literasi keuangan dengan akses pembiayaan juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Nkundabanyanga, et al. (2014). Dalam penelitian ini, peneliti menguji hasil penelitian Nkundabanyanga, et al. (2014) yang mengukur hubungan antara literasi keuangan sebagai variabel bebas terhadap akses pembiayaan sebagai variabel dependen. Penelitian ini ditujukan untuk melihat apakah literasi keuangan berperan signifikan dalam menentukan kemudahan akses pembiayaan UMKM yang merupakan komponen penting dalam menjaga keberlangsungan usaha UMKM. Karena minimnya pengetahuan dan akses terhadap sumber daya keuangan berhubungan dengan ketidakmampuan perusahaan dalam mencapai tujuan (Beck, DemirgucKunt, dan Maksimovic, 2005; Hutchinson dan Xavier, 2006; Malo dan Norus, 2009; dan Coad dan Tamvada, 2012). Selain itu, penelitian juga ditujukan untuk melihat apakah terdapat *research gap* antara penelitian serupa yang dilakukan terhadap *Small and Medium Enterprises* (SMEs) yang beroperasi di Kampala, Uganda dengan UMKM yang berada di Bandung, Indonesia.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah para pelaku UMKM binaan Paguyuban Pengusaha Kecil Menengah (PPKM) untuk Wilayah Rancaekek dan Cileunyi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pembina PPKM, yaitu Bapak Surya Budiawan, ditemukan bahwa akses pembiayaan merupakan salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memulai maupun mengembangkan bisnisnya. Hal ini disebabkan antara lain karena banyak UMKM yang masih dinilai *unbankable* oleh pihak lembaga keuangan karena minimnya pencatatan pembukuan maupun tidak adanya aset yang dapat dijadikan sebagai *collateral* oleh pihak lembaga keuangan, selain itu kurangnya informasi mengenai ketersediaan layanan pembiayaan dan minimnya pengetahuan mengenai instrumen pembiayaan beserta ketentuannya pada lembaga keuangan juga kerap membatasi kemampuan para pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan. Hal ini menjadi landasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi**

Keuangan Terhadap Akses Pembiayaan UMKM (Studi pada Anggota UMKM Binaan PPKM Wilayah Rancaekek dan Cileunyi)”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan para pelaku UMKM binaan PPKM untuk wilayah Rancaekek dan Cileunyi?
2. Bagaimana tingkat akses pembiayaan pada UMKM binaan PPKM untuk wilayah Rancaekek dan Cileunyi?
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap akses pembiayaan pada UMKM binaan PPKM untuk wilayah Rancaekek dan Cileunyi?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat literasi keuangan para pelaku UMKM binaan PPKM untuk wilayah Rancaekek dan Cileunyi
2. Mengetahui tingkat akses pembiayaan pada UMKM binaan PPKM untuk wilayah Rancaekek dan Cileunyi
3. Mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap akses pembiayaan pada UMKM binaan PPKM untuk wilayah Rancaekek dan Cileunyi

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil empiris dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam lingkup ilmu kewirausahaan dengan fokus pada literasi keuangan dan akses pembiayaan serta dapat menjadi rujukan pendukung bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan literasi finansial dan mengetahui dampaknya terhadapnya akses pembiayaan yang merupakan salah satu faktor penting dari keberlangsungan usaha. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi gambaran kepada pihak-pihak penyedia akses pembiayaan mengenai tingkat literasi keuangan pelaku UMKM sebagai debitur.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan arah dan gambaran materi yang terdapat dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, serta ruang lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai karakteristik responden, hasil penelitian, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian yang telah dilaksanakan beserta masukan yang dapat diberikan kepada pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang terkait.